

Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Belota Pura Dalam Pengelolaan Usaha Jual Beli Beras Di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

Syahrul Mubarak Kalape¹; Isbon Pageno²; Harianto A. Lamading³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; syahrulmubarakkalape@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; ispageno@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; hariantoalamading@gmail.com

* Correspondence : syahrulmubarakkalape@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Evaluasi, BUMDes, Pengelolaan Usaha, Jual Beli Beras

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juli 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan usaha jual beli beras oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Belota Pura di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. BUMDes ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan teori evaluasi dari Robert E. Stake, (2003) yang menekankan pada prinsip deskriptif, partisipatif, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras di BUMDes Belota Pura belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menghambat antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat BUMDes, serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola usaha dan infrastruktur yang kurang memadai turut memengaruhi efektivitas usaha. Akses pasar yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing harga beras yang dijual. Berdasarkan teori evaluasi Robert E. Stake, penelitian ini menilai bahwa evaluasi harus dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan usaha jual beli beras dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar usaha BUMDes lebih efektif. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan perbaikan dalam manajemen usaha, transparansi keuangan, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi produk. Diperlukan juga peningkatan partisipasi masyarakat dan pelatihan bagi pengelola BUMDes agar usaha ini dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian desa.

ABSTRACT:

This study aims to evaluate the management of rice buying and selling business by Village-Owned Enterprises (BUMDes) Belota Pura in Donggulu Village, Kasimbar District, Parigi Moutong Regency. This BUMDes was established with the aim of strengthening the village economy through business management based on local potential. This study uses a descriptive qualitative approach by applying the

evaluation theory of Robert E. Stake, (2003) which emphasizes descriptive, participatory, and contextual principles. The results of the study indicate that the management of rice buying and selling business in BUMDes Belota Pura has not been running optimally. Inhibiting factors include low community participation in management, lack of understanding of the objectives and benefits of BUMDes, and non-transparent financial management. Furthermore, limited human resources for managing the business and inadequate infrastructure also impact its effectiveness. Limited market access is also a major obstacle to increasing the competitiveness of rice prices. Based on Robert E. Stake's evaluation theory, this study assesses that evaluations must be descriptive to reflect actual conditions on the ground, participatory by involving relevant stakeholders, and contextual, taking into account the village's social, cultural, and economic conditions. This evaluation aims to provide a clearer picture of the management of the rice trading business and to identify areas for improvement to make the BUMDes business more effective. This study recommends improvements in business management, financial transparency, and infrastructure development to support smooth product distribution. Increased community participation and training for BUMDes managers are also needed to ensure this business can have a greater impact on the village economy.

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Otonomi di Indonesia lahir akibat adanya perubahan tata kelola pemerintahan akibat adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi terdesentralisasi (Widianingsih *et al.*, 2020). Otonomi yang berjalan di Indonesia tidak hanya bagi daerah yang memiliki otonomi daerah, tetapi desa juga memiliki otonomi desa di mana desa memiliki hak mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional karena desa memiliki peran strategis sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi lokal secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sjafrizal, (2018), pembangunan ekonomi daerah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, desa dituntut mampu mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar tercipta kemandirian ekonomi desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa didorong untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan perekonomian desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa.

Melalui Undang-Undang Desa, pemerintah juga memberikan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN dengan jumlah sekitar Rp600 juta hingga Rp1,2

miliar setiap tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) dan (4). Namun demikian, desa tidak dapat sepenuhnya bergantung pada bantuan tersebut sehingga perlu menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan desa secara mandiri. Dalam hal ini, BUMDes menjadi sarana yang dapat menciptakan interaksi ekonomi antara pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan BUMDes juga dapat mendorong masyarakat untuk membuka usaha dan kegiatan perdagangan sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai katalisator, yaitu sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan melalui pembangunan kemitraan dan penghubung antar pemangku kepentingan (Septian *et al.*, 2025)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Ridlwan, 2015). Disamping itu, BUMDes juga mengambil peran penting agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes menjelaskan bahwa peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan usahanya efisiensi dan efektifitas harus selalu di tekankan BUMDes sebagai badan hukum di bentuk berdasarkan tata perundang undangan yang berlaku ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya di sesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang di miliki masing-masing desa (Ridlwan, 2015). Salah satu strategi yang di lakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Senjani, 2019). Pendirian BUMDes ini kemudian di atur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa di anjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah.

Dalam penyelenggaraannya BUMDes yang dilakukan oleh setiap desa ini

tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Usaha milik desa ini perlu adanya perhatian khusus agar tidak terbengkalai. Kenyataannya tidak sedikit badan-badan usaha milik desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak terurus oleh sebab itu dalam mengelola usaha desa ini, di perlukan adanya SDM yang benar-benar bermental bisnis agar terus berkembang dan terus berinovasi. Desa Donggulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Desa ini memiliki Badan Usaha Milik Desa BUMDes Bernama Belota Pura yang di bentuk pada tanggal 10 Januari 2016 yang di muat dalam peraturan Desa Donggulu No. 01 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Dengan penyertaan modal awal pembentukan BUMDes sebesar 89 juta yang berasal dari Dana Desa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di berbagai desa masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian Anggraeni, (2016) menemukan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelola, transparansi keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha desa. Sementara itu, penelitian Ramadana, (2013) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kemampuan manajerial sering menjadi penyebab BUMDes tidak berkembang secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes memerlukan tata kelola yang baik agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pada awal pembentukan, BUMDes Belota Pura Desa Donggulu Memiliki 5 unit usaha yaitu : Unit usaha jasa, Unit usaha perikanan dan kelautan, dan Unit usaha pertanian, perkebunan dan peternakan, Unit usaha Simpan Pinjam, dan Unit usaha industri & kerajinan rakyat. Namun yang menjadi prioritas program unggulan di tahun pertama ialah unit usaha perikanan dan kelautan berupa pembuatan rompong dan unit usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan berupa jual beli pupuk bagi petani. Selama beberapa bulan di jalankan program-program unit usaha tersebut bisa di katakan berjalan dengan cukup baik tetapi masih banyak masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam berjalannya program BUMDes tersebut.

Meski demikian, pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura belum sepenuhnya optimal. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan modal yang menghambat kelancaran pengadaan beras. Walaupun pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa modal usaha, jumlah yang tersedia masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan BUMDes dalam menjaga pasokan beras yang stabil, sehingga terkadang masyarakat mengalami kekurangan beras, terutama pada musim panen atau saat permintaan meningkat. Selain masalah keterbatasan modal, pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya transparan juga menjadi hambatan. Beberapa masyarakat merasa kurang yakin dengan kelancaran operasional BUMDes Belota Pura, mengingat tidak ada laporan yang jelas mengenai perkembangan usaha dan penggunaan dana. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan BUMDes juga terbatas.

Meskipun usaha jual beli beras ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau, tidak semua lapisan masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah. Faktor jarak, sistem pembayaran yang tidak fleksibel, dan keterbatasan tempat penjualan menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam mengakses beras yang disediakan BUMDes. Hal ini menyebabkan beberapa warga lebih memilih membeli beras di pedagang lain yang lebih mudah dijangkau.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan. Diharapkan, dengan evaluasi yang tepat, BUMDes Belota Pura dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Donggulu.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengelolaan BUMDes, hambatan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha desa.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pengelolaan BUMDes dengan menggunakan pendekatan *Responsive Evaluation* Robert E. Stake, 2003) yang meliputi aspek deskriptif dan partisipatif, kontekstual, berbasis stakeholder, serta responsif terhadap nilai sosial. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya memahami bagaimana pengelolaan BUMDes dilaksanakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa, serta bagaimana nilai sosial dan kondisi lokal memengaruhi keberlangsungan usaha desa.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dianggap mengetahui persoalan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, buku, dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengelolaan BUMDes di lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan terkait. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, foto kegiatan, dan arsip yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan

dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Donggulu. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta pengawasan BUMDes.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kesiapan konseptual dan teknis sebelum turun ke lapangan. Proses pengumpulan data dibantu dengan penggunaan pedoman wawancara, buku catatan, telepon genggam untuk dokumentasi dan perekaman, serta alat pendukung lainnya yang membantu proses pengumpulan dan pengolahan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles *et al.*, (2014) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh dapat diorganisasikan, dipahami, dan ditarik kesimpulan secara sistematis sesuai fokus penelitian.

Hasil

1. Prinsip Deskriptif Partisipatif

Evaluasi deskriptif dan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan program agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura Desa Donggulu, keterlibatan masyarakat terlihat sejak tahap awal pembentukan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Daifan Kalape, S.Pd selaku Sekretaris Desa, diketahui bahwa usaha jual beli beras dibentuk melalui musyawarah desa pada tahun 2022 yang melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat. Musyawarah tersebut dilakukan untuk membahas kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan beras di desa, sehingga keputusan pembentukan usaha lahir dari kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keterlibatan stakeholder juga terlihat dalam proses pengawasan dan evaluasi usaha BUMDes. Sapri AM Tolah, S.Pd selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa BPD memiliki peran dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai aturan serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pengurus BUMDes. Melalui forum musyawarah dan pertemuan desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait pengelolaan usaha, termasuk mengenai pelayanan dan kebutuhan masyarakat terhadap usaha jual beli beras tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya dilakukan oleh pengurus semata, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat dan lembaga desa lainnya.

Selain itu, Amirsyam S. Rauf selaku Ketua BUMDes menjelaskan bahwa pengurus berupaya menjaga komunikasi dengan masyarakat melalui pemberian ruang masukan terkait harga beras maupun sistem pembayaran. Salah satu bentuk

penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat ialah penerapan sistem cicilan bulanan agar masyarakat tetap dapat memperoleh beras meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pengurus BUMDes untuk menyesuaikan pengelolaan usaha dengan kondisi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya kekurangan dalam aspek transparansi pengelolaan usaha. Arfandi, S.Pd.I selaku masyarakat desa menyampaikan bahwa masyarakat masih mengharapkan adanya laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan yang lebih terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha desa.

2. Prinsip Kontekstual

Evaluasi kontekstual menekankan pentingnya memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam pelaksanaan suatu program. Dalam pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura Desa Donggulu, aspek kontekstual terlihat dari penyesuaian usaha dengan kondisi masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amirsyam S. Rauf selaku Ketua BUMDes, diketahui bahwa usaha jual beli beras dibentuk karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki tingkat permintaan tinggi di Desa Donggulu. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, usaha tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan beras agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan utama.

Kesesuaian usaha dengan kondisi masyarakat juga disampaikan oleh Sapri AM Tolah, S.Pd selaku Ketua BPD. Ia menjelaskan bahwa keberadaan usaha jual beli beras sangat membantu masyarakat karena masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga dari pedagang luar desa. Selain itu, BUMDes memperoleh pasokan beras dari petani lokal sehingga usaha tersebut turut mendukung hasil pertanian masyarakat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha BUMDes memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Donggulu, khususnya pada sektor pertanian.

Hal serupa juga disampaikan oleh Almikdam Hi Sahido selaku petani desa yang menyatakan bahwa keberadaan usaha jual beli beras memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh beras dengan harga yang lebih stabil dan wajar. Menurutnya, usaha tersebut juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pedagang dari luar desa. Dengan demikian, pengelolaan usaha BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala dalam pengelolaan usaha jual beli beras. Amirsyam S. Rauf menjelaskan bahwa sistem pembayaran secara cicilan sering menyebabkan keterlambatan pembayaran dari masyarakat sehingga memengaruhi kelancaran modal usaha BUMDes. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas operasional usaha, meskipun

pengelola BUMDes tetap berupaya menyesuaikan sistem usaha dengan kondisi ekonomi masyarakat Desa Donggulu.

3. Prinsip Berbasis Stakeholders

Evaluasi berbasis stakeholder menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan dan evaluasi suatu program. Dalam pengelolaan usaha jual beli beras di BUMDes Belota Pura Desa Donggulu, keterlibatan stakeholder terlihat dari adanya kerja sama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam mendukung operasional usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sapri AM Tolah, S.Pd selaku Ketua BPD, dijelaskan bahwa BPD memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, BPD juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pengurus BUMDes dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan masyarakat terkait pengelolaan usaha. Praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama mencerminkan konsep *collaborative problem solving*, di mana permasalahan kompleks membutuhkan kontribusi individu dengan keahlian dan perspektif berbeda agar dapat diselesaikan secara efektif (Amanda *et al.*, 2026)

Keterlibatan stakeholder juga terlihat dari upaya pengurus BUMDes dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat. Amirsyam S. Rauf selaku Ketua BUMDes menjelaskan bahwa pengurus secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas perkembangan usaha jual beli beras dan menerima masukan dari masyarakat. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pengurus BUMDes dalam melibatkan masyarakat pada proses pengelolaan usaha desa. Di sisi lain berbagai kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat kepatuhan normatif yang relatif serupa terhadap prinsip *good governance* dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang sangat berbeda (Kamindang *et al.*, 2025).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha juga disampaikan oleh Almikdam Hi Sahido selaku petani desa. Ia menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun keluhan terkait pelayanan dan pengelolaan usaha jual beli beras. Keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan desa menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha BUMDes.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam evaluasi usaha masih menghadapi kendala pada aspek penyampaian informasi. Arfandi, S.Pd.I mengungkapkan bahwa laporan perkembangan usaha BUMDes masih perlu diperjelas agar masyarakat dapat mengetahui kondisi usaha secara lebih terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai perkembangan usaha dan penggunaan dana menjadi hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

4. Prinsip Responsif Terhadap Nilai Sosial

Evaluasi responsif terhadap nilai sosial menekankan bahwa suatu program tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Dalam pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura Desa Donggulu, nilai sosial terlihat dari upaya BUMDes dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amirsyam S. Rauf selaku Ketua BUMDes, diketahui bahwa keberadaan usaha jual beli beras memberikan manfaat langsung kepada masyarakat karena masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih stabil dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan membeli dari pedagang luar desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai usaha ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat desa.

Nilai sosial dalam pengelolaan usaha juga terlihat dari adanya semangat gotong royong dan kebersamaan antara masyarakat dan pengelola BUMDes. Sapri AM Tolah, S.Pd selaku Ketua BPD menjelaskan bahwa usaha jual beli beras mencerminkan nilai kemandirian desa karena masyarakat ikut mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan BUMDes. Selain memperoleh manfaat ekonomi, masyarakat juga merasa memiliki keterlibatan dalam menjaga keberlanjutan usaha desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha masih perlu dikembangkan agar manfaat sosial yang diberikan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Arfandi, S.Pd.I menyampaikan bahwa pengurus BUMDes perlu mengembangkan jenis usaha lain yang dapat mendukung perekonomian masyarakat desa, misalnya dengan memasarkan produk lokal masyarakat selain beras. Menurutnya, pengembangan usaha yang lebih variatif dapat memperluas manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Donggulu.

Selain itu, Almikdam Hi Sahido selaku petani desa juga menyampaikan bahwa usaha jual beli beras telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan. Namun, ia berharap agar usaha tersebut terus dikembangkan sehingga tidak hanya berfokus pada penyediaan beras, tetapi juga mampu memperkuat kondisi ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan agar BUMDes dapat terus responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi yang berkembang di desa.

Pembahasan

1. Prinsip Deskriptif Partisipatif Dalam Pengelolaan BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura telah menerapkan prinsip deskriptif dan partisipatif sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *Responsive Evaluation* Robert E. Stake. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pemberian masukan terhadap pengelolaan usaha, serta keterlibatan BPD dalam pengawasan menunjukkan bahwa

proses pengelolaan usaha tidak hanya berpusat pada pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan stakeholder yang berkepentingan. Dalam perspektif Stake (2003), evaluasi partisipatif menekankan pentingnya memahami pengalaman dan kebutuhan stakeholder secara langsung agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan usaha jual beli beras menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pengelolaan usaha yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Cohen & Uphoff, (1980) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga ikut terlibat dalam proses musyawarah dan penyampaian aspirasi terkait pengelolaan usaha BUMDes. Keterlibatan tersebut menjadi indikator penting dalam menciptakan pengelolaan usaha desa yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes juga menunjukkan adanya hubungan sosial yang cukup kuat antara pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Donggulu. Musyawarah yang dilakukan secara bersama memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang mereka hadapi terkait usaha jual beli beras. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai wadah sosial yang memperkuat komunikasi dan kerja sama antar masyarakat desa. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengelolaan usaha, maka akan tumbuh rasa memiliki terhadap BUMDes sehingga masyarakat cenderung lebih mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan. Situasi tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan BUMDes, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha desa.

Namun demikian, partisipasi yang telah berjalan masih menghadapi kendala pada aspek transparansi pengelolaan usaha. Keinginan masyarakat terhadap laporan perkembangan dan laporan keuangan yang lebih terbuka menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan BUMDes masih perlu ditingkatkan. Menurut Mardiasmo, (2021), transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi publik karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat pengawasan sosial terhadap pengelolaan program. Dalam pengelolaan BUMDes, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga menyangkut keterbukaan pengurus dalam menjelaskan perkembangan usaha dan penggunaan modal desa kepada masyarakat. Keterbatasan dan Kesulitan dalam mengakselerasi kerangka baru (aturan) dalam aktivitas tugasnya, karena aspek sumber daya manusia dan *rule driven* penggeraknya belum berubah secara total sehingga mentalitas lama yang ada pada setiap wajah aparatur daerah masih bergelayut dengan amannya (Alamsyah, 2009).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan akses masyarakat terhadap

informasi hasil pengelolaan usaha. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam forum musyawarah desa, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme penyampaian informasi yang rutin dan mudah diakses mengenai perkembangan usaha maupun kondisi keuangan BUMDes. Akibatnya, partisipasi yang terbentuk cenderung lebih kuat pada tahap perencanaan dibandingkan pada tahap pengawasan dan evaluasi. Dalam perspektif evaluasi responsif Robert E. Stake, kebutuhan dan harapan stakeholder tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memperoleh informasi yang memadai mengenai hasil pelaksanaan program. Ketika kebutuhan informasi tersebut belum terpenuhi, maka tingkat responsivitas pengelolaan program terhadap *stakeholder* belum dapat dikatakan optimal.

Permasalahan transparansi ini juga mengindikasikan adanya tantangan kelembagaan dalam tata kelola BUMDes Belota Pura. Belum tersedianya sistem pelaporan yang terstruktur dan disampaikan secara berkala kepada masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya dukungan sosial terhadap keberlanjutan BUMDes. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan usaha BUMDes tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan pengelola membangun akuntabilitas melalui keterbukaan informasi yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus dalam administrasi, pelaporan, dan penyebarluasan informasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola usaha desa secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Anggraeni, (2016) yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan keterbukaan pengelola dalam menjalankan usaha desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan dukungan lebih besar terhadap BUMDes apabila pengelolaan usaha dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pengelolaan BUMDes Belota Pura.

2. Prinsip Kontekstual Dalam Kondisi Masyarakat Pada Pengelolaan BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura telah menyesuaikan program usaha dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Donggulu. Hal ini terlihat dari pemilihan jenis usaha yang berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dalam perspektif evaluasi kontekstual Robert E. Stake, suatu program perlu dipahami berdasarkan kondisi lingkungan tempat program tersebut dijalankan sehingga

evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Stake, 2003). Dengan demikian, usaha jual beli beras yang dijalankan BUMDes Belota Pura dapat dikatakan telah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sebagai dasar pelaksanaan usaha.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Soetomo, (2013) yang menyatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat harus memperhatikan potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang dijalankan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai sumber pasokan beras menunjukkan adanya upaya pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi desa. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, usaha tersebut juga memberikan ruang bagi petani lokal untuk mendukung aktivitas ekonomi desa melalui kerja sama dengan BUMDes.

Kesesuaian usaha jual beli beras dengan kondisi masyarakat Desa Donggulu menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat desa secara langsung. Pemilihan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok membuat program lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena sesuai dengan kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat setempat. Selain itu, mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani juga menjadikan usaha ini memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas ekonomi desa sehari-hari. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu usaha desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan usaha tersebut dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menyesuaikan diri dengan karakteristik lokal desa.

Namun demikian, kendala keterlambatan pembayaran cicilan masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi keberlangsungan operasional usaha BUMDes. Menurut Chambers, (2014), masyarakat pedesaan umumnya memiliki keterbatasan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap persoalan akses modal dan kestabilan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan program ekonomi desa perlu memiliki sistem pengelolaan yang fleksibel dan adaptif terhadap kemampuan masyarakat. Dalam penelitian ini, penerapan sistem cicilan menjadi bentuk penyesuaian BUMDes terhadap kondisi ekonomi masyarakat, meskipun di sisi lain sistem tersebut menimbulkan tantangan terhadap perputaran modal usaha.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat tidak serta-merta menjamin keberlanjutan usaha BUMDes. Secara substansial, usaha jual beli beras memang telah menjawab kebutuhan dasar masyarakat Desa Donggulu, namun dalam pelaksanaannya muncul tantangan berupa rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi BUMDes. Disatu sisi, BUMDes dituntut memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memiliki

keterbatasan ekonomi, tetapi di sisi lain BUMDes juga harus menjaga kesehatan keuangan usaha agar mampu terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Apabila keseimbangan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka usaha yang pada awalnya dirancang untuk membantu masyarakat justru berpotensi mengalami hambatan dalam pengembangan usaha akibat terganggunya arus kas dan perputaran modal.

Dari perspektif evaluasi kontekstual Robert E. Stake, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat tidak hanya menjadi dasar dalam perencanaan program, tetapi juga menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Karakteristik masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pendapatan sektor pertanian menyebabkan kemampuan pembayaran sangat dipengaruhi oleh musim panen, harga komoditas, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan usaha jual beli beras memerlukan strategi yang lebih adaptif, seperti pengaturan jadwal pembayaran yang menyesuaikan siklus pendapatan masyarakat atau penguatan mekanisme pengawasan terhadap pembayaran cicilan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam mengelola risiko yang muncul dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Febriansyah *et al.*, (2023) yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal desa, seperti potensi sumber daya alam, budaya masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program usaha desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan usaha BUMDes, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya akses informasi usaha, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi BUMDes Belota Pura yang mengembangkan usaha jual beli beras berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi pertanian Desa Donggulu.

3. Prinsip Berbasis *Stakeholders* Dalam Pengelolaan BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura telah menerapkan prinsip evaluasi berbasis stakeholder melalui keterlibatan pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam proses pengelolaan usaha. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya pola pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat langsung dari program usaha desa. Dalam perspektif Freeman, (2010), stakeholder merupakan seluruh pihak yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas organisasi, sehingga keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dan lembaga desa dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan adanya upaya membangun pengelolaan usaha yang lebih partisipatif dan kolaboratif.

Selain itu, keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan dan komunikasi usaha

menunjukkan adanya penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan BUMDes. Ansell & Gash, (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan aktor pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, forum pertemuan yang dilakukan pengurus BUMDes bersama masyarakat menjadi media komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyampaian aspirasi, dan evaluasi terhadap pengelolaan usaha jual beli beras. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan BUMDes telah berupaya menciptakan hubungan kerja sama antara pengurus dan masyarakat desa.

Keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pengelolaan usaha jual beli beras menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja sama antar unsur masyarakat desa. Pengelolaan usaha yang melibatkan pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, dan masyarakat menciptakan proses komunikasi yang lebih terbuka dalam penyampaian kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan usaha. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan usaha desa bukan hanya bergantung pada kemampuan pengurus dalam menjalankan usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Semakin baik hubungan antar *stakeholder* yang terbangun, maka semakin besar pula peluang BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek transparansi informasi masih perlu ditingkatkan. Keinginan masyarakat terhadap laporan perkembangan usaha yang lebih terbuka menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholder* belum sepenuhnya optimal dalam proses evaluasi usaha. Menurut (Mardiasmo, 2021), transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan organisasi publik karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program. Dalam konteks BUMDes, penyampaian laporan perkembangan usaha secara terbuka menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui kondisi usaha serta penggunaan dana desa yang dikelola oleh BUMDes.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *stakeholder* dalam pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya menjamin terciptanya proses evaluasi yang efektif. Secara formal, pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, dan masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan usaha. Akan tetapi, masih adanya harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi mengindikasikan bahwa sebagian *stakeholder* belum memperoleh akses yang memadai untuk memahami perkembangan usaha secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholder* masih cenderung berfokus pada aspek kehadiran dalam forum atau kegiatan tertentu, sementara keterlibatan dalam memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha belum berjalan secara optimal. Akibatnya, proses evaluasi yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran bersama berpotensi kehilangan efektivitas karena tidak seluruh pihak memiliki informasi yang

cukup untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Dari perspektif *stakeholder theory*, hubungan antara organisasi dan *stakeholder* tidak hanya dibangun melalui partisipasi, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan informasi yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dan legitimasi organisasi. Dalam konteks BUMDes Belota Pura, keterbatasan transparansi berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka kualitas kepercayaan yang selama ini menjadi modal sosial BUMDes dapat mengalami penurunan dan memengaruhi dukungan masyarakat terhadap pengembangan usaha di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pelaporan, penyampaian informasi secara berkala, serta pembukaan ruang evaluasi yang lebih inklusif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keterlibatan *stakeholder* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha BUMDes.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rofiq & Fittria, (2026) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam mendukung pengelolaan usaha desa. Penelitian tersebut menekankan bahwa komunikasi yang baik antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat keberlanjutan usaha desa. Temuan tersebut sejalan dengan pengelolaan BUMDes Belota Pura yang melibatkan pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam pengelolaan usaha jual beli beras di Desa Donggulu.

4. Prinsip Responsif Tata Kelola BUMDes Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura telah mencerminkan prinsip responsif terhadap nilai sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori evaluasi Robert E. Stake. Usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan beras dengan harga yang terjangkau. Dalam perspektif evaluasi responsif, suatu program dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat nyata sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat serta mempertimbangkan dampak sosial dari pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, keberadaan usaha jual beli beras di Desa Donggulu menunjukkan adanya upaya BUMDes dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan desa.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Eko, (2015) yang menyatakan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks penelitian ini, nilai gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung usaha BUMDes menunjukkan bahwa pengelolaan usaha desa masih dipengaruhi oleh nilai sosial masyarakat

pedesaan yang mengutamakan kebersamaan dan kepentingan kolektif. Nilai sosial tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan usaha BUMDes di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa. Dalam konteks implementasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan awal (Firdaus *et al.*, 2024).

Selain itu, kebutuhan untuk mengembangkan usaha agar manfaatnya lebih luas menunjukkan bahwa BUMDes perlu memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Menurut Kurniawan, (2015), pengelolaan BUMDes yang baik harus mampu menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa agar manfaat dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa. Dalam konteks penelitian ini, harapan masyarakat agar BUMDes mengembangkan usaha berbasis produk lokal menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penguatan ekonomi desa yang lebih luas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Responsivitas BUMDes terhadap nilai sosial masyarakat juga terlihat dari upaya pengelola dalam menjaga keseimbangan antara tujuan usaha dan kepentingan sosial masyarakat desa. Keberadaan usaha jual beli beras tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mendukung usaha BUMDes menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa solidaritas dan kepedulian terhadap keberlangsungan usaha desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Meskipun usaha jual beli beras telah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan manfaat yang dihasilkan masih relatif terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa responsivitas BUMDes terhadap nilai sosial belum sepenuhnya berkembang ke arah pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Harapan masyarakat agar BUMDes mengembangkan usaha berbasis produk lokal menunjukkan adanya kebutuhan baru yang tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Dengan kata lain, manfaat sosial yang diberikan BUMDes saat ini telah mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara orientasi pelayanan sosial dan tuntutan pengembangan usaha yang produktif. Jika BUMDes terlalu berfokus pada fungsi sosial, maka kemampuan lembaga untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan desa dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila orientasi keuntungan

lebih dominan, maka fungsi sosial yang menjadi karakter utama BUMDes berpotensi berkurang. Dalam perspektif evaluasi responsif Robert E. Stake, kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami perubahan kebutuhan stakeholder sebagai dasar pengembangan program. Oleh karena itu, pengembangan unit usaha yang memanfaatkan potensi lokal desa dapat menjadi strategi untuk memperluas manfaat sosial sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi BUMDes, sehingga nilai sosial yang ingin diwujudkan tidak hanya tercermin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Rofiq & Fittria, 2026) yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat memperkuat kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari keuntungan usaha, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai sosial masyarakat Desa Donggulu.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha jual beli beras oleh BUMDes Belota Pura Desa Donggulu secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip *Responsive Evaluation* Robert E. Stake. Pada aspek deskriptif partisipatif, masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan pengurus BUMDes telah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha. Pada aspek kontekstual, usaha yang dijalankan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap ketersediaan beras. Pada aspek berbasis *stakeholder*, pengelolaan usaha didukung oleh kolaborasi berbagai pihak yang berkontribusi dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan pengembangan usaha. Sementara itu, pada aspek responsif terhadap nilai sosial, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap beras, dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa transparansi informasi dan pengelolaan modal masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Keterbatasan modal usaha, keterlambatan pembayaran cicilan, serta belum optimalnya keterbukaan laporan perkembangan usaha berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha dan tingkat kepercayaan masyarakat. Temuan ini memperkaya kajian mengenai tata kelola BUMDes berbasis evaluasi responsif serta menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengakomodasi kebutuhan, nilai sosial, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal perlu menjadi perhatian pemerintah desa dan pengelola BUMDes guna meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada Dr. Isbon Pageno, MA dan Harianto A. Lamading, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan peneliti yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait topik penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam berbagai proses penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berusaha, dan menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.

Referensi

- Alamsyah, M. N. (2009). *Birokrasi Lokal Dalam Tantangan Akselerasi Pembangunan Sulawesi Tengah*. 131–144.
- Amanda, M., Sasterio, & Husain, S. (2026). *Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Vatu Mapida*. 02(01), 132–156.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–168.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Chambers, R. (2014). *Rural Development: Putting The Last First*. Routledge.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place In Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. In *World Development* (Vol. 8, Issue 3). Elsevier.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*. *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Firdaus, A., Waris, I., & Natsir, N. (2024). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. 1(4), 24–35. <https://doi.org/10.61722/jirs.V1i3.861>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge

University

Press.

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Npma_QeioPKc&oi=fnd&pg=PR5&dq=Freeman,+R.+E.+\(2015\).+Strategic+Management:+A+Stakeholder+Approach.+Cambridge+University+Press.&ots=62ioi3jaqn&sig=JsId3ssy_Tu2a_Q4xrcyptry4uc&redir_esc=y#v=onepage&q=Freeman%2c](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Npma_QeioPKc&oi=fnd&pg=PR5&dq=Freeman,+R.+E.+(2015).+Strategic+Management:+A+Stakeholder+Approach.+Cambridge+University+Press.&ots=62ioi3jaqn&sig=JsId3ssy_Tu2a_Q4xrcyptry4uc&redir_esc=y#v=onepage&q=Freeman%2c)

- Kamindang, I., Masu, K. H., Asrifai, & Ahsan, S. C. (2025). *Good Governance Sebagai Meta Governance*. 2(12), 2197–2207. <https://doi.org/10.62335>
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Brawijaya University.
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 314, 424–440. <https://doi.org/10.25041>
- Rofiq, M. K., & Fittria, A. (2026). *Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa: Penguatan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia*. Cv. Penerbit Ilmu Literasi Dan Riset (Pilar).
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V1i3.23698>
- Septian, M. R., Asrifai, & Rusdin, R. B. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. *Jsip: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.53697/Iso.V5i1.2547>
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Rajawali Press.
- Soetomo, P. M. M. M. A. (2013). Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Stake, R. E. (2003). *Standards-Based And Responsive Evaluation*. Sage Publications.
- Widianingsih, I., Setiawan, H., & Chuddin, M. (2020). *Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Cipta Rahayu Di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung*. 3(2), 225–238.